

Dalam Dekap Serdadu: Pergundikan di Tangsi Militer, 1872-1913

Mutia Zaskia Nasution^{1*}, Kurniawati², M. Hasmi Yanuardi³

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 13220, mutiazaskian@gmail.com

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 13220, kurniawati@unj.ac.id

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 13220, hasmiyanuardi@unj.ac.id

*Corresponding email: zaskiannn@gmail.com

Abstract

This article aims to highlight the life of concubines in the military world in the Dutch East Indies in the period 1872-1913 and to present various views of the pros and cons that made this practice considered quite controversial at its time. In order for the objectives of this research to be carried through, the author applied historical research method which has five stages consisting of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. By using primary and secondary sources in the form of contemporary newspapers, documents, books, and articles relevant to the research theme. The practice of concubinage within the military barracks could not be separated from the establishment of an army under the name of Koninklijk Leger in the early 19th century. This practice was used to be associated with demoralization and also believed to be the source of several health issues amongst the soldiers, as well as encouraging the birth of a white proletariat class in the colonies, this leads to mixed opinions regarding the relationship between these two different races. This commotion prompted the colonial government to issue several policies, one of which was to increase military morale. After all, the concubine of tangsi is considered very detrimental, this practice indirectly joined a mixed society group known as the Indo group, where this group later helped support Indis culture in the Dutch East Indies.

Keywords

Concubine; Military; Moentji.

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menyoroti kehidupan pergundikan dalam dunia militer di Hindia Belanda pada periode 1872-1913 serta menampilkan berbagai pandangan pro dan kontra yang membuat praktik ini dianggap cukup kontroversial pada masanya. Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder yang berupa surat kabar sezaman, dokumen, buku, serta artikel yang relevan dengan tema penelitian. Praktik pergundikan tangsi tidak lepas dari pembentukan suatu pasukan ketentaraan yang bernama Koninklijk Leger pada awal abad ke-19. Praktik ini selalu dikaitkan dengan demoralisasi dan juga diyakini sebagai penyebab munculnya masalah kesehatan di antara para serdadu, serta mendorong lahirnya kelas proletariat kulit putih di tanah koloni yang membuat hubungan antar dua ras berbeda ini tidak jarang mengundang perdebatan di masyarakat. Kegaduhan tersebut membuat pemerintah kolonial pada akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya

meningkatkan moral militer. Betapa pun pergundikan tangsi dianggap menuai banyak dampak merugikan, praktik ini secara tidak langsung turut sebuah golongan masyarakat campuran yang dikenal dengan golongan Indo, di mana kelompok ini nantinya turut mendukung kebudayaan Indis di Hindia Belanda.

Kata kunci

Pergundikan; Militer; Moentji.

**Received: 14 January 2022*

**Revised: 23 March 2022*

**Accepted: 29 April 2022*

**Published: 30 April 2022*

Pendahuluan

Pergundikan pada awal abad ke-19 merupakan realitas kehidupan masyarakat colonial yang kerap terabaikan dalam narasi sejarah Indonesia. Praktik ini dianggap sebagai hal yang tabu karena merupakan hubungan di luar perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki yang pada umumnya berasal dari dua ras berbeda, hal tersebut dianggap tidak lazim. Dalam konteks Hindia Belanda, banyak laki-laki Eropa yang tak mengawini perempuan pribumi, melainkan hidup dengannya sebagai seorang gundik. Banyak istilah untuk menamakan seorang gundik, yang paling umum ialah 'nyai'. Istilah-istilah lain dalam bahasa Belanda untuk seorang gundik ialah *huishoudster*, *bijzit*, *ménagére*, dan *meid* (Hellwig, 2008). Para nyai bertugas mengurus rumah tangga seperti mencuci, memasak serta menjadi teman tidur bagi para laki-laki Eropa dan hidup layaknya suami istri. Hal ini menjadi ciri dan sifat sebuah sistem yang cukup kekal dalam kehidupan masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Sebuah sistem kolonial dengan kerumitan sosial besar, tidak hanya bagi laki-laki Eropa dan nyai pribumi, tetapi juga bagi *bastaarden* yang lahir dari hubungan campur tersebut (Baay, 2017).

Praktik kelim ini dimulai sejak Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) mengembangkan sayapnya dalam dunia perdagangan Nusantara dan mendatangkan orang-orang Eropa berstatus lajang ke Hindia untuk kemudian ditempatkan di beberapa wilayah dagangnya sebagai pegawai rendahan VOC ataupun tenaga militer. Ironisnya, meningkatnya jumlah laki-laki berstatus lajang yang datang lebih banyak dari perempuan. Di sisi lain, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan melarang imigrasi perempuan Eropa dengan alasan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pelayaran dan mendatangkan para perempuan Eropa cukup mahal. Ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan Eropa di koloni serta adanya kebijakan larangan menikah bagi laki-laki Eropa yang baru tiba di Hindia mendorong para pria lajang ini mencari jalan keluar lain untuk menangani hasrat biologisnya. Yakni terjun dalam praktik pergundikan dengan perempuan setempat, baik Pribumi, Timur Asing, maupun golongan campuran atau Indo. Perempuan yang menjadi nyai pada umumnya berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi tergolong rendah yang ingin terlepas dari jeratan kemiskinan. Meski ada juga sebagian dari mereka yang berasal dari keluarga priyayi yang diserahkan keluarganya kepada orang Eropa atau Belanda untuk mengamankan kedudukan dan jabatan sang ayah. Memang

sistem feodal tidak serta merta mengandung unsur komersialisasi seksual secara keseluruhan. Namun, mereka menjadi dasar yang mengidentifikasi nilai perempuan sebagai komoditas.

Praktik pergundikan acap kali mengundang pandangan pro dan kontra di masyarakat. Bukan hanya karena melibatkan dua ras yang berbeda. Lebih dari itu, dampak yang disebabkan dari hubungan semacam ini menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah kolonial. Meski begitu, praktik semacam ini bertahan cukup lama dan merupakan bagian dari realitas kehidupan masyarakat kolonial, khususnya dalam dunia ketentaraan.

Berbeda dengan penelitian dengan tema pergundikan sebelumnya yang telah ditulis oleh Olga Olifiani Putri dengan judul “Perempuan Pada Masa Kolonial: Nyai di Perkebunan Teh Priangan Tahun 1890-1902” yang menjelaskan tentang kehidupan sosial-ekonomi nyai di perkebunan serta sudut pandang masyarakat mengenai keberadaannya (Putri, 2019). Penelitian mengenai pergundikan tangsi juga telah sedikit di bahas oleh Dilla Sari pada tahun 2017 dalam artikel berjudul “Pergundikan dalam Tangsi Militer Belanda Tahun 1830-1918” yang menjelaskan tentang proses munculnya pergundikan dalam tangsi militer, peran moentji di dalam tangsi, beserta permasalahan yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Sedangkan, dalam tulisan ini penulis berusaha menyoro kehidupan pergundikan di tangsi militer pada periode 1872-1913 serta menampilkan beberapa pandangan pro dan kontra di masyarakat mengenai praktik ini.

Kisah pergundikan di tangsi menjadi menarik untuk diteliti karena kebanyakan masyarakat awam hanya terpaku pada narasi besar seperti kisah-kisah golongan elite, sehingga kisah sejarah semacam ini jarang terdengar, karena hal ini dianggap tabu untuk diangkat sehingga belum ada yang membahasnya dari segi historis. Padahal, praktik ini pada gilirannya turut melahirkan suatu golongan baru di masyarakat kolonial yang kita kenal dengan kaum Indo.

Metode Penelitian

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, penulis menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup beberapa langkah, yakni (1) pemilihan topik; (2) pengumpulan sumber; (3) verifikasi (kritik sejarah/keabsahan sumber); (4) interpretasi: analisis dan sintesis; serta (5) penulisan (Kuntowijoyo, 2013). Pemilihan topik dilakukan berdasarkan kedekatan emosional dan intelektual, di mana adanya ketertarikan penulis terhadap perempuan yang kerap terabaikan dalam narasi sejarah, padahal gundik sebagai perempuan tentunya memiliki peran dalam hubungan pergundikan, bukan hanya pajangan semata.

Untuk tahap pengumpulan sumber penulis melakukan pengumpulan sumber primer berupa surat kabar dan majalah sezaman, maupun dokumen serta buku yang bertemakan militer dan sejarah masa kolonial yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional,

Perpustakaan Pusat Sejarah TNI, serta situs penyedia sumber sejarah digital Delpher.nl. Adapun sumber sekunder berupa buku koleksi pribadi, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian. Setelah sumber terkumpul, kemudian data diverifikasi secara interen maupun ekstern untuk mengetahui keautentikan data yang diperoleh. Selanjutnya tahap interpretasi, penulis mencoba menganalisis dan menafsirkan makna dari fakta-fakta yang telah terverifikasi, sehingga fakta yang diperoleh saling berkesinambungan untuk kemudian dikemas dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Militer dan Lahirnya Pergundikan Tangsi

Pergundikan di dalam tangsi bermula ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu pasukan yang menjadi bagian dari aparat penguasa kolonial bernama Oost Indische Leger (Tentara Hindia Timur) pada 4 Desember 1830 yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch (1830-1834), yang kemudian oleh Raja Willem 1 (1815-1840) diubah menjadi Koninklijk Leger atau Tentara Kerajaan sekitar tahun 1836. Pembentukan pasukan ini dilakukan dengan harapan terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah koloni agar tercipta stabilitas politik, melihat fakta bahwa pada periode tersebut terdapat banyak ancaman perlawanan lokal. Oleh karena itu, pemerintah merekrut serdadu bayaran di segala penjuru Eropa dan Hindia yang pada umumnya merupakan berasal dari keluarga miskin, desertir (pelarian militer), orang-orang dengan catatan kriminal, ataupun orang yang ingin mencari penghidupan baru di luar negerinya. Sejak tahun 1855 hingga 1893, dari 72.006 serdadu, 27.146 orang di antaranya adalah bangsa Eropa non-Belanda (Matanasi, 2011).

Bagi para serdadu Eropa, salah satu syarat yang ditanggguhkan untuk dapat bergabung dalam Koninklijk Leger yakni minimal telah berusia 18 tahun ke atas dan belum menikah (Boon & Strom, 1908). Berbeda halnya dengan para serdadu pribumi. Kebanyakan dari para serdadu ini merupakan laki-laki yang sudah menikah di usia muda, dan kemungkinan besar akan menolak untuk pergi bersama perekrut ke barak jika tidak boleh mengikutsertakan istrinya. Hal tersebut membuat Administrasi Angkatan Darat dengan berat hati mengizinkan mereka turut serta memboyong istrinya masuk ke tangsi atau Chambrée (De Expres, 1912). Perizinan untuk membawa perempuan bagi serdadu pribumi, serta adanya kebijakan pemerintah yang mempersulit berlangsungnya pernikahan bagi anggota militer di bawah pangkat sersan mayor dan jabatan tertentu yang tertuang dalam Perintah Umum No. 62 Tahun 1872 (Ming, 1983) membuat pemerintah juga mengizinkan para serdadu lajang untuk hidup bersama tanpa pernikahan dengan perempuan di dalam tangsi, hal ini menandakan kelahiran pergundikan tangsi di Hindia Belanda. Jika praktik semacam ini tidak diperbolehkan, dikhawatirkan para serdadu justru akan memiliki hubungan dengan istri-istri serdadu pribumi dan menimbulkan pertengkaran.

Kendati demikian, Administrasi Angkatan Darat tidak serta merta mengizinkan para perempuan yang hendak dipergundik masuk ke dalam tangsi dengan leluasa. Mereka harus mendapatkan bukti keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepala kampung yang bersangkutan dan disahkan oleh kepala desa setempat agar dapat diterima oleh perwira militer untuk diizinkan tinggal dan menetap (Deli Courant, 1903). Jika terbukti benar, mereka secara resmi diizinkan bergabung dengan militer ke dalam tangsi. Perlu diketahui, para perempuan yang menjadi nyai ini tidak hanya wanita pribumi, di dalam tangsi juga terdapat para nyai Indo eropa. Kebanyakan dari nyai Indo merupakan anak perempuan yang dilahirkan dari pergundikan tangsi ataupun dari masyarakat sipil yang menempati kelas masyarakat paling rendah.

Menariknya, para nyai dalam tangsi militer ini memiliki panggilan khusus, mereka dikenal dengan sebutan *moentji*. Nama ini berasal dari bahasa Belanda yang mengatakan “*niet op haar mondje gevallen*” yang berarti bahwa seseorang yang tidak takut untuk mengatakan apa yang dia pikirkan (Baay, 2017). Kebiasaan di antara orang-orang Eropa untuk tidak memanggil nyai yang hidup bersama mereka dengan nama depannya, namun menggunakan nama kelompok cukup menjelaskan bagaimana hubungan di antara mereka. Antara tuan dan pelayan, antara penjajah dan terjajah.

Kehidupan Tangsi dalam Kemelut Pergundikan

Kehidupan tangsi bukan sekadar aba-aba militer dan latihan senapan, bukanlah gambaran masyarakat yang sepenuhnya laki-laki. Sebaliknya, orang akan mendapat gambaran yang beragam, di mana kehadiran perempuan dan anak-anak turut mewarnai dunia militer. Ketika fajar terbit dan tiupan terompet mulai menggema di seantero tangsi, saat itulah para serdadu, istri, nyai atau *moentji*, dan anak-anak memulai aktivitas kehidupannya. Disaat para serdadu melakukan apel pagi dan baris berbaris pada pukul enam, di waktu yang bersamaan para perempuan membersihkan kamar mereka dan mengantar anak-anak ke sekolah sebelum pergi ke bangsal perempuan untuk melakukan tugasnya sebagai seperti mencuci pakaian, menyetrika, dan memasak (Baay, 2017). Demi mengenyangkan perut tuannya, para nyai dituntut untuk dapat menghidangkan makanan ala Eropa dengan bahan yang tersedia, seperti daging panggang ataupun perkedel. Di satu sisi, lidah para serdadu asing ini juga dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan makanan yang ada. Secara tidak langsung nyai berperan sebagai agen sosial dalam proses akulturasi di bidang kuliner.

Kehadiran para *moentji* di dalam tangsi memberi para pria kesan ‘sebuah rumah’ di tengah keterasingannya. Mengingat para serdadu—asing maupun pribumi—terisolasi di masyarakat dan dipandang sebelah mata. Mereka dianggap tak lebih dari sekelompok orang pembunuh, pezina, dan pemabuk. Serdadu bawahan secara turun-temurun telah dijadikan kelas terhina dalam masyarakat kolonial (Matanasi, 2011). Akibatnya, mereka yang tidak memiliki akses ke kerabat sipil, dan lebih menemukan kenyamanan dengan pengurus rumah tangganya. Belum lagi rimba raya Hindia dan Perang Aceh (1873-1904)

yang mencekam terkadang membuat mental para serdadu tertekan, di sinilah para perempuan memainkan perannya. Mereka memberikan pasangan serdadunya dukungan moral agar berani melanjutkan ekspedisi.

“kita dapat mengamati, para moentji menjaga suaminya apabila terluka dalam ekspedisi ataupun dievakuasi karena sakit. Beberapa banyak cerita yang kita degar tentang wanita pribumi dalam menyelamatkan nyawa "laki-laki" mereka yang terluka dalam bahaya dari kematian.” (Soerabaiasch Handelsblad, 1903).

Bagi para serdadu *moentji* merupakan rahmat, bagaikan oase di gurun pasir. Perhatian serta sikap ramah sang *moentji* juga mampu mengubah suasana tangsi yang keras dan membosankan menjadi hunian yang nyaman. Mereka yang tidak memiliki gundik—dan terutama para prajurit muda Eropa—sering bercengkrama dengan kawan-kawan yang hidup dalam hubungan pergundikan, mereka membentuk semacam lingkaran pertemanan dan secara bertahap belajar tentang bahasa Melayu (Van Rees & De Graaf, 1901). Pun berlaku sebaliknya, sedikit banyak dari para serdadu bumiputra juga belajar mengenal kosakata asing, karena perintah dan aba-aba militer diberikan dalam bahasa Belanda sehingga perwira dan bintara asing maupun bumiputra harus mempelajari bahasa Belanda untuk kepentingan militer (Rocher & Santosa, 2006).

Perilaku minum-minuman keras para anggota militer di dalam tangsi pun dapat diredam dengan keberadaan *moentji*. Hidup bersama seorang nyai dianggap menjadikan para pria ini lebih bertanggung jawab, karena harus menafkahi dan mencukupi kebutuhan sang gundik dan anak-anaknya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk menghamburkan uang dengan bermabuk-mabukan. Kehadiran para nyai di *chambreé* umumnya sangat dihargai. Tak hanya sebagai pembantu rumah tangga dan pelayan tuannya, para wanita ini juga membantu masyarakat tangsi dalam urusan domestik lainnya. Secara tidak langsung pergundikan merupakan praktik eksploitatif yang dibingkai secara positif. Padahal, di negeri induk Belanda seseorang harus mengeluarkan uang lebih untuk dapat memiliki pembantu rumah tangga. Jelas hal ini merupakan salah satu keuntungan finansial untuk menjaga gaji tentara kolonial agar tetap rendah. Hal ini juga digunakan sebagai salah satu argumen pendukung pergundikan tangsi di abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20.

Antara Pro Dan Kontra

Ketika masyarakat Eropa di koloni mulai berkembang pesat di sekitar pergantian abad 20, pandangan tentang pergundikan pun mulai berubah dan perlahan mulai bermunculan protes terhadap pergundikan tangsi. Terutama ketika gagasan politik etis mulai bergema di tanah koloni, hal ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat kulit putih tentang pentingnya menjaga superioritas ras. Tendensi superioritas ras menimbulkan stigma bahwa Belanda sebagai negara beradab sudah semestinya melindungi ‘kebersihan dan keunggulan’ budayanya. Namun dengan adanya praktik pergundikan, supermasi kulit putih pun ternodai, karena mereka bersanding dengan

gadis dari ras yang berbeda dan inferior dan melahirkan anak-anak berkulit campuran. Hal tersebut tentunya mengusik perasaan superioritas masyarakat Eropa secara umum, dan elit kulit putih di Hindia secara khusus. Atas dasar itulah muncul pendapat mengenai bayangan masyarakat tangsi militer di Hindia yang penuh kemaksiatan dan kebobrokan. Kecaman demi kecaman mulai bergema di Hindia bahkan sampai dengan di negeri Belanda, praktik ini pun tak luput dari berbagai pandangan pro dan kontra.

Argumen utama mengenai kecaman terhadap pergundikan yakni dikarenakan praktik ini disinyalir membuat para serdadu mengalami degradasi moral sehingga menyebabkan pelakunya gemar bermabuk-mabukan, ternodanya suprermasi kulit putih, hingga merebaknya penyakit kelamin di tangsi (Van Rees & De Graaf, 1901). Di dalam buku Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda Baay memaparkan bahwa perdebatan mengenai kehidupan liar dalam tangsi serta bobroknya moral dalam ketentaraan kolonial kian menyebar di masyarakat luas. Hal tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwa hubungan tanpa pernikahan mereka dengan para perempuan pribumi adalah penyebabnya (Baay, 2017). Dalam sebuah ruangan besar, ratusan prajurit tidur bersama gadis atau pembantu tumah tangga mereka di atas ranjang. Tanpa mengindahkan kesopanan, mereka bercinta di hadapan penghuni lainnya (Gouda, 2007).

Kendati demikian, anggapan pergundikan menyebabkan kebobrokan moral menjadi kontradiksi ketika terdapat catatan dari Administrasi Angkatan Darat pada Oktober 1888, yang menyatakan bahwa dari 96 orang perwira yang dimintai pendapat mengenai perilaku serdadu yang tinggal dengan gundik; 60 orang menyebut perilaku lelaki yang hidup dalam pergundikan lebih baik daripada serdadu yang lain. Pendapat tersebut diperkuat oleh surat pernyataan untuk Jendral Angkatan Darat pada 4 Februari 1889, yang menjelaskan mengenai perilaku serdadu yang tinggal dengan gundik biasanya lebih baik daripada yang tidak hidup dengan gundik.

“Prajurit itu tercatat tinggal dengan pengurus rumah tangga (moentji) membuat dirinya menjalani kehidupan yang lebih teratur, karena perawatan yang diberikan oleh wanita itu. Secara materi ia juga lebih baik daripada orang yang tidak memiliki gundik. Juga tidak dapat disangkal bahwa bunuh diri sangat jarang terjadi di antara serdadu yang hidup dalam pergundikan, atau membelot kepada musuh” (Van Rees & De Graaf, 1901).

Hidup bersama seorang nyai juga dianggap mampu menahan pria dari kebiasaan bermabuk-mabukan. Salah seorang penulis surat kabar *De Locomotief* pada tahun 1898 menjelaskan bahwa para nyai dapat mengisi kejenuhan dalam kehidupannya yang sepi, karena kehidupan yang sepi dan membosankan berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan alkohol.

“Jika dia memiliki kecenderungan untuk minum alkohol, dan rasa malunya belum berlalu, dia akan menahan diri demi wanita pribumi itu, yang menganggap blanda maboq orang yang keji.” (De Locomotief, 1898).

Opini tersebut diperkuat dengan adanya catatan pada tahun 1909 mengenai jumlah anggota militer yang dihukum karena mabuk. Tercatat bahwa mereka yang mendapat hukuman di antaranya; 25 personel yang sudah menikah; 327 yang hidup bersama gundik; 2177 yang tidak hidup dalam pergundikan (Weijl & Boogardt, 1917). Terlihat bahwa tentara yang hidup dalam pergundikan jauh lebih sedikit mendapatkan hukuman karena mabuk dibanding mereka yang lajang. Meski demikian, pandangan merendahkan tetap saja melekat pada diri laki-laki yang tenggelam dalam kubangan pergundikan. Hidup dengan wanita pribumi berarti memakan makanan mereka, dipengaruhi oleh kepercayaan dan praktik budaya mereka.

Bagi mereka yang mengancam pergundikan tangsi, anak-anak merupakan argumen yang paling memberatkan. Melihat fakta bahwa anak hasil pergundikan ini tumbuh dalam iklim tangsi yang kasar, ditelantarkan oleh orang tua dan tidak memiliki harapan akan masa depan yang cerah, membuat para oposisi pergundikan memberi kesimpulan bahwasanya dengan membiarkan praktik amoral ini terus berlangsung sama halnya mendukung peningkatan kaum proletariat Indo eropa. Dengan adanya sekelompok orang setengah Eropa yang lahir dari praktik tersebut, batas-batas rasial tidak hanya menjadi kurang jelas, keturunan dari hubungan antar ras juga mengganggu supremasi kulit putih. Bagi masyarakat sipil Eropa, anak-anak dari pergundikan tangsi merupakan hal yang mengerikan. Mereka dilihat sebagai wujud kebobrokan moral orang-orang Eropa di koloni. Namun, panglima militer justru melihat banyak keuntungan dari anak-anak di dalam tangsi. Kehadiran anak-anak ini—demikian pendapatnya—meningkatkan kenyamanan tempat tinggal dan menumbuhkan rasa tanggung jawab para anggota militer. Di samping itu mereka merupakan tenaga cadangan untuk dijadikan serdadu dan nyai tangsi yang baru (Baay, 2017).

Pandangan kontra lainnya datang dari Menteri Urusan Kolonial Levinus Keuchenius (1888-1890) dalam surat kabinetnya tertanggal 21 Juni 1888 mengutuk keras pergundikan tangsi karena dianggap bertentangan dengan nilai kristen dan tidak bermoral, oleh karena itu pergundikan harus dihapuskan (Deli Courant, 1903). Tanpa mengesampingkan berbagai pandangan kontra yang ada, sayangnya para serdadu ini—khususnya Eropa dan kristen—juga tidak mendapatkan fasilitas untuk bisa menikah. Pergundikan juga diyakini sebagai penyebab munculnya masalah kesehatan di antara para serdadu, yang tidak lain ialah penyakit kelamin. Menariknya, betapa pun pergundikan tangsi mengundang kontroversi, Raad van Indie (Dewan Hindia Belanda) pada tanggal 22 Maret 1889 No. XVII menyatakan bahwa praktik tersebut harus ditoleransi karena memiliki banyak keuntungan, dan melarangnya sama sekali bukan solusi (Van Rees & De Graaf, 1901). Jika pergundikan dihapuskan, dikhawatirkan akan muncul kemungkinan kejahatan yang lebih buruk. Dengan absennya para nyai, seorang serdadu yang sebelumnya memberikan gajinya kepada gundiknya, kemudian akan membelajakan uang itu untuk membeli alkohol ataupun cenderung akan menyalurkan hasrat seksualnya ke rumah-rumah bordil atau hubungan homoseksual di dalam tangsi.

Hal lain yang tidak jauh merugikan yakni terjadinya lonjakan pengeluaran mulai dari biaya hunian tambahan untuk para anggota militer yang menikah, biaya pensiunan untuk para janda militer, serta kenaikan gaji para serdadu.

Sayangnya toleransi ini tidak bertahan cukup lama. Meski pada tahun 1901 telah dikeluarkannya *Koninklijke Besluiten* (Keputusan Kerajaan) yang berisi anjuran untuk mempertimbangkan kembali pembukaan parade gereja sebagai upaya memperbaiki moral militer. Respon masyarakat yang kian masif merongrong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkrit. Akhirnya pada tahun 1913, Gubernur Jenderal A.W.F Idenburg (1909-1916) menyatakan bahwa pergundikan dalam tangsi militer benar-benar dihapuskan secara perlahan (Baay, 2017). Hal ini diikuti oleh kebijakan pemberhentian izin secara bertahap untuk memiliki gundik di dalam tangsi kepada anggota militer dengan pangkat bintara atau NCO Eropa serta pribumi Kristen, bukan serdadu berpangkat rendah atau Jan Fuselier (De Expres, 1914).

Dampak Dari Pergundikan

Pergundikan di dalam tangsi memberikan dampak yang cukup serius bagi para praktisi bahkan sampai dengan anak keturunannya. Hal ini selalu dikaitkan dengan demoralisasi yang menyedihkan serta pembentukan generasi Indo miskin yang identik dengan penelantaran. Praktik yang sebelumnya dianggap sangat menguntungkan ini pada gilirannya menjadi bumerang bagi pemerintah kolonial. Bagi serdadu, terjun dalam pergundikan jelas menguntungkan secara finansial, namun sangat berisiko terjangkit penyakit kelamin.

Banyak anggota militer baik berpangkat rendah maupun tinggi di Hindia Belanda yang menjadi korban dari keganasan penyakit ini. Terbukti bahwa pada 25 februari 1902, tercatat sebanyak 396 orang anggota militer terdiagnosa penyakit kelamin di rawat di rumah sakit, di antaranya ialah 7 orang NCO dan 6 orang Jan Fuselier yang hidup dengan gundik. Jumlah tersebut kian meningkat setiap tahunnya. Dilansir dari *Concubinaat in de Indische Kazernes* bahwa pada periode 1909 sampai 1912 terjadi kenaikan angka pengidap sifilis di kalangan serdadu. Puncaknya terjadi pada tahun 1912, yang mana 14,56% dari 11.202 kekuatan serdadu Eropa terjangkit penyakit mengerikan ini (Weijl & Boogardt, 1917). Tertular penyakit kelamin bukanlah suatu hal yang sepele, penyakit ini bisa sangat menyakitkan dan memicu penyakit kejiwaan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Belum lagi sarana pengobatan yang belum memadai pada periode tersebut membuat perawatannya berlangsung cukup lama, dan tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya, kerugian material maupun mental menjadi permasalahan bagi pimpinan ketentaraan waktu itu (Suryono, 2005).

Sedangkan bagi nyai, secara umum tidak ada hal menguntungkan yang ia dapatkan dari praktik ini selain peningkatan materi. Hal tersebut tidak sebanding dengan dampak yang mereka alami ketika mereka telah terjun dalam kubangan pergundikan. Para perempuan ini mengalami penindasan baik secara seksual maupun sosial. Seorang

gundik sebagai perempuan yang terjajah, dengan kedudukannya sebagai babu dan pemuas nafsu adakalanya digambarkan harus tabah terhadap agresi fisik laki-laki. Dalam buku *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial Di Hindia Belanda 1900-1942* yang ditulis oleh Gouda disebutkan bahwa para nyai kerap kali menanggung akibat kemarahan “hanya karena laki-laki merasa frustrasi menghadapi kehidupannya atau telah menenggak alkohol” (Gouda, 2007). Sebagai subjek yang disubordinasi dan *powerless*, mereka tidak memiliki kemampuan mengartikulasikan suaranya untuk menuntut status hubungan yang sah. Lemahnya status mereka di mata hukum menyebabkan mereka tidak memiliki hak atas anak-anak yang dilahirkannya. Pun stereotipe bodoh dan tidak berkembang yang melekat pada diri perempuan pribumi—cenderung merendahkan martabatnya sebagai perempuan—membuat mereka dianggap tidak layak menjadi istri sah dan bersanding dengan para lelaki Eropa, apalagi menjadi ibu bagi anak-anak setengah Eropa.

Tatkala hubungan pergundikan yang dijalannya berakhir—baik itu karena permintaan serdadu atau masa tugasnya selesai—banyak dari nyai diminta angkat kaki dari tangsi, acapkali para perempuan ini tidak memiliki tempat untuk kembali pulang ke kampung, karena kehadiran mereka kurang diterima di lingkungan masyarakat. Begitupun untuk menemukan pasangan Pribumi, dengan status mantan gundik yang tersemat pada dirinya membuat hal ini menjadi lebih sulit apalagi kalau mereka dah berumur. Hal tersebut tak jarang membuat para mantan gundik ini terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan dan terperosok ke dalam dunia prostitusi.

Hadirnya anak-anak yang lahir dari hubungan pergundikan dianggap sebagai personifikasi kebobrokan moral orang-orang Eropa di koloni, mereka pun kerap menanggung akibat dari praktik ini. Anak-anak ini melambangkan jurang budaya yang amat lebar antara nilai-nilai Eropa—yang berciri kerja keras dan beradab—di satu sisi, dan sikap apatis serta hubungan seks bebas di masyarakat pribumi, di sisi lain (Gouda, 2007). Penelantaran dan diskriminasi yang dilayangkan kepada anak-anak pemilik darah campuran ini—terutama para kaum Eropa totok serta keluarga Indo terpandang yang selalu memandang jijik kepada mereka—membuat mereka hidup seperti kaum marginal yang bertahan hidup dengan menenggelamkan diri pada praktik amoral dan pekerjaan-pekerjaan rendahan. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan situasi masa kini, anak-anak bule justru menjadi incaran produser ataupun dunia hiburan.

Dalam kasus ini, jumlah anak yang diakui oleh ayah mereka cukup rendah. Mereka yang tidak memperoleh pengakuan sebagian besar lahir dalam keadaan yatim, atau ditinggal oleh sang ayah ke negeri asalnya. Pengakuan anak-anak ini akan diizinkan hingga satu bulan setelah kelahiran sang anak untuk diakui atas perizinan Gubernur Jenderal. Selain itu, pengakuan hanya dapat dilakukan oleh seorang ayah yang sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih tua dari anak yang diakui. Motivasi dalam memberikan pengakuan pun beragam. Menurut Kementrian Koloni, diketahui bahwa pada 1890 ternyata terdapat 2.500 anak yang tinggal di dalam tangsi. Jumlah ini meningkat sampai sekitar 7.000 anak pada tahun 1900. Dari jumlah tersebut hanya 1.746 orang anak

terdaftar sebagai anak anggota militer Eropa (Van Rees & De Graaf, 1901). Akibat penelantaran yang dilakukan, banyak anak-anak yang lahir dari pergundikan mengalami krisis identitas.

Mereka tidak dapat berbaaur dengan masyarakat Eropa—karena mengalami penolakan—maupun pribumi, tidak jarang mereka berada di luar masyarakat tersebut dan membentuk kelompok tersendiri, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayah Eropanya dan berada dalam lapisan masyarakat ekonomi ke bawah. Sehingga terciptalah sebuah kelompok masyarakat miskin dari ras campuran. Penelantaran serta diskriminasi yang terstruktur membuat mereka hidup seperti kaum marginal yang bertahan hidup dengan menenggelamkan diri dalam praktik pelacuran, perjudian, penyelundupan opium, dan melakukan kerjaan pertukangan yang umumnya tidak disukai karena merupakan pekerjaan kasar dan dianggap kurang terhormat (Soekiman, 2014). Bukan hanya menodai supremasi kulit putih, dikhawatirkan jika anak-anak Indo ini hidup sebagai orang miskin, mereka akan mengembangkan kebencian terhadap masyarakat kulit putih.

Keadaan ekonomi orang tua yang sulit pun tak jarang membuat nasib anak-anak ini berujung di panti asuhan atau mengikuti jejak orangtuanya terjun ke dalam dunia militer. Terlebih bagi mereka anak laki-laki campuran yang tumbuh dan terbiasa dengan kehidupan dunia tangsi. Hal tersebut tidak dapat kita temukan pada anak-anak kaya dari populasi Indo, orang tua mereka tidak akan menyerahkan anak-anaknya kepada *Koninklijk Leger*, kecuali niatnya memimpin untuk mencoba mencapai pangkat perwira (Van Rees & De Graaf, 1901). Sementara anak-anak perempuan Indo seringkali menjadi korban dari sistem pergundikan ataupun dipersiapkan sebagai pasangan untuk para prajurit dan laki-laki dari suatu komunitas campuran generasi baru yang disebut Belanda sebagai *Mardjiker* (orang yang dibebaskan) dan orang Kristen pribumi (Taylor, 2009). Pemandangan para gadis Indo hasil keturunan campuran yang dipergundik oleh seorang Tionghoa menjadi momok yang mengerikan di tengah masyarakat Eropa. Hal tersebut menjadi simbol penghancuran prestise bangsa Eropa di dalam koloni yang mencoreng martabat masyarakat kulit putih. Betapa pun pergundikan tangsi dianggap amat menyengsarakan dan menjadikan anak-anak yang tak bersalah menjadi korban dari kejahatan orang dewasa. Praktik ini secara tidak langsung turut melahirkan sebuah golongan masyarakat campuran, dimana kelompok ini nantinya turut mendukung kebudayaan Indis di Hindia Belanda.



Gambar 1. Kamar tentara pribumi yang sudah menikah
(sumber: Buku *Het KNIL van Tempo Doeloe*)

Kesimpulan

Dalam dunia militer, pergundikan merupakan realitas yang tak dapat dihindarkan. Latar belakang terjadinya pergundikan tangsi disebabkan ketika pemerintah kolonial membentuk sebuah pasukan ketentaraan bernama Koninklijk Leger yang terdiri dari komponen serdadu asing maupun pribumi pada awal abad ke-19. Kehidupan pergundikan di tangsi militer bukanlah gambaran masyarakat yang sepenuhnya laki-laki. Sebaliknya, orang mendapat gambaran yang beragam. Para gundik pun turut memainkan peran di dalam tangsi, mereka tak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga membawa banyak manfaat bagi kehidupan para serdadu. Meskipun di sisi lain praktik ini juga menuai pro dan kontra di masyarakat dan membuahkan dampak-dampak yang cukup merugikan pemerintah kolonial dan berpengaruh pada tatanan struktur sosial masyarakat kolonial. Praktik ini tak hanya memberikan dampak bagi para praktisinya, tapi juga bagi anak-anak yang lahir dari pergundikan tangsi. Betapa pun pergundikan tangsi dianggap amat menyengsarakan dan menjadikan anak-anak yang tak bersalah menjadi korban dari kejahatan orang dewasa. Praktik ini secara tidak langsung turut melahirkan sebuah golongan masyarakat campuran, dimana kelompok ini nantinya turut mendukung kebudayaan Indis di Hindia Belanda.

Daftar Rujukan

- Baay, R. (2017). *Nyai & pergundikan di Hindia Belanda*. Depok: Komunitas Bambu.
- Boon, C. J., & Strom, G. (1908). *Organisatie en indeeling van de land- en zeenacht in Nederlandsch Oost-Indie*. In Koninklijk Militaire Academie.
- De Expres*. (1912, September). *Het Concubinaat in 't Leger*. *De Eerste Bandoengsche Publicatie Maatschappij*. *De Indische Courant*, *De Dierentuin*, 2 Januari 1933
- De Expres*. (1914). *Kazerne-Concubinaat*. *De Eerste Bandoengsche Publicatie Maatschappij*.
- De Locomotief*. (1898, December 23). *Het concubinaat in Nederland-Indië*. *De Groot, Kolff & Co. Deli Courant*. (1903, January). *Het Concubinaat in het N. I. Leger*.
- Gouda, F. (2007). *Dutch Culture Overseas: praktik kolonial di Hindia Belanda 1900-1942*. Jakarta: Serambi.

- Hellwig, T. (2008). *Citra kaum perempuan di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Matanasi, P. (2011). *Sejarah tentara: munculnya bibit-bibit militer di Indonesia masa Hindia Belanda sampai awal kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Narasi.
- Ming, H. (1983). Barracks-Concunbinage in the Indies, 1887-1920. *Indonesia*, (35), 63-94.
- Putri, O. (2019). *Perempuan pada masa kolonial: nyai di Perkebunan Teh Priangan tahun 1890-1902*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Rocher, J., & Santosa, I. (2006). *KNIL: perang kolonial di Nusantara dalam catatan Prancis*. Jakarta: Kompas.
- Soekiman, D. (2014). *Kebudayaan Indis: dari zaman kompeni sampai revolusi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Soerabaiasch Handelsblad. (1903). *Uit Onze Koloinen*. Kolff & Co.
- Suryono, R. P. (2005). *Seks dan kekerasan pada zaman kolonial: penelusuran kepustakaan sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Taylor, J. G. (2009). *Kehidupan sosial di Batavia: Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur*. Depok: Komunitas Bambu.
- Van Rees, D. F. W., & De Graaf, S. (1901). *Het Pauperisme onder De Europeanen in Nederlandsch-Indië (Jild ke-1)*. Landsdrukkerij.
- Weijl, S., & Boogardt, W. H. (1917). *Concubinaat in de Indische Kazernes*. Hollandia-drukkerij